



Lagi, Jokowi Sentil Kepala Daerah



Jakarta, MIMBAR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap saat ini masih ada segelintir kepala daerah yang tidak bisa menjawab saat ditanya soal angka inflasi di daerahnya. Padahal, ia selalu menanyakan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah.

“Sekarang kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, Bupati saya tanya ‘inflasinya berapa bulan kemarin?’” kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas XVI APKASI di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Jokowi pun meminta agar para kepala daerah benar-benar mempelajari segala hal termasuk yang terpenting kondisi perekonomian daerah dan

perkembangan harga bahan pangan.

“Kalau yang saya tanya tidak bisa jawab, mohon maaf, masih ada satu dua,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung angka inflasi nasional yang bisa dikendalikan pada kisaran 2,5 persen per Juni 2024.

Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 5,11 persen pada kuartal pertama, kendati kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja.

■ Bersambung ke Hal 11



Saya lihat, karena hampir saya sudah 85 persen kota dan kabupaten yang saya kunjungi, pantai-pantai kita juga tidak kalah dengan yang namanya Maldives tadi.”

JOKO WIDODO
Presiden RI

Presiden Joko Widodo menguraikan tantangan yang dihadapi Indonesia selama lima tahun terakhir dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. (Foto Presiden.go.id)

Vonis Bebas Eks Bupati Langkat Kejagung Bakal Ajukan Kasasi

Jakarta, MIMBAR - Kejaksaan Agung memastikan bakal mengajukan kasasi terhadap vonis bebas yang diberikan PN Stabat kepada eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin di kasus TPPO.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan pengajuan Kasasi dilakukan lantaran vonis dari Majelis Hakim dinilai belum memenuhi keadilan bagi masyarakat.

■ Bersambung ke Hal 11



Hasyim Asy'ari Resmi Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jakarta, MIMBAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai anggota sekaligus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tidak hormat. Pemberhentian dilakukan setelah Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila seperti yang diputus Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pencopotan dilakukan melalui keputusan presiden. Aturan itu telah berlaku sejak Selasa (9/7). “Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal

■ Bersambung ke Hal 11

Kejati Sumut Tuntut Mati 44 Tersangka Kasus Narkotika

Medan, MIMBAR - Periode Januari hingga Juni 2024, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah menuntut pidana mati sebanyak 44 terdakwa untuk tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya di wilayah hukum Kejati Sumut.

Kejati Sumut melalui salah seorang Koordinator Bidang Intelijen, Yos A Tarigan SH MH yang juga mantan Kasi Penkum Kejati Sumut, Rabu (10/7/2024) menyampaikan, tuntutan pidana mati diharapkan memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika, termasuk bandar dan pengguna. Kemudian, lanjut Yos, para pengedar maupun sindikat lainnya

■ Bersambung ke Hal 11



Jadwal Salat

4 MUHARRAM 1446 H

Subuh : 05:00 WIB	Maghrib : 18:43 WIB
Zuhur : 12:34 WIB	Isya : 19:57 WIB
Ashar : 15:59 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Batas Usia

Oleh Dr A Rasyid, MA



USIA manusia memang memberi makna dalam kehidupan. Soalnya ada usia yang diberi panjang oleh Allah, dan ada juga usia pendek. Usia panjang misalnya bisa hidup seratus tahun, usia pendek bisa begitu lahir sesaat kemudian meninggal dunia.

Antara usia panjang dan usia pendek sering menjadi perdebatan.

Sebab banyak orang berdoa agar usianya dipanjangkan. Ini menunjukkan bahwa usia panjang menjadi dambaan banyak orang. Perdebatannya muncul karena ada juga

■ Bersambung ke Hal 11

KLAIM PANGLIMA TNI TERKAIT KEBAKARAN RUMAH WARTAWAN DI KARO

Tak Ada Parjurit yang Terlibat

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut tak ada keterlibatan prajurit TNI di kasus kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV dan tiga orang anggota keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

“Enggak ada [Keterlibatan],” kata Agus di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/7).

Agus pun menyebut perihal kasus itu kini telah diatasi oleh Polri. Kodam I/Bukit Barisan juga telah membantah dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus tersebut.

“Sudah kita cek, isu itu tidak benar,” kata Kapendam I/BB, Kolonel Inf Rico J Siagian saat dihubungi, Minggu (7/7).

Sebelumnya, dalam insiden kebakaran itu, empat orang



tewas terbakar yakni Sempurna Pasaribu (40), istrinya Eprida Br Ginting (48), anaknya Sudiinveseti Pasaribu (12) dan cucunya bernama Lowi Situngkir (3).

Berdasar rilis yang dikeluarkan Dewan Pers, Tim pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumut yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Tel-

evisi (IJTI) Sumut, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, disebut telah melakukan verifikasi dan pendalaman kasus kebakaran tersebut.

Dari hasil investigasi ditemukan sejumlah fakta, bahwa kasus kebakaran yang

■ Bersambung ke Hal 11

LUAR NEGERI

Israel Kembali Menggila

Gempur 4 Sekolah, Tewaskan
Puluhan Warga Sipil

Gaza, MIMBAR - Pasukan Israel menggempur empat bangunan sekolah dalam empat hari dan menewaskan puluhan orang. Dari jumlah ini, tiga di antaranya merupakan fasilitas pendidikan yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada Selasa (9/7), Israel menyerang bangunan Sekolah Al Awda di Abassan, dekat Khan Younis. Imbas serangan ini setidaknya 30 orang tewas.

Di hari sebelumnya yakni pada Senin, sejumlah orang terluka gegara gempuran Israel di sekolah yang dioperasikan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina

■ Bersambung ke Hal 11



- Bagai meludah ke langit ...
- Hehehe ...

Sindikatis Judi Online Retas Situs Pemerintah

Jakarta, MIMBAR - Polisi meringkus sindikat judi online yang bermarkas di sebuah apartemen di daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Mereka merupakan komplotan peretas situs milik pemerintah hingga pendidikan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan peretasan itu dilakukan untuk mempromosikan situs judi online yang mereka kelola.

"Tersangka tersebut memasarkan atau mengiklankan situs judi online dengan cara meretas dan mengubah tampilan website pemerintah maupun pendidikan," kata Andri saat dihubungi, Rabu (10/7).

Menurut Andri, para tersangka ini memang menasasar keamanan terbelah lemah untuk diretas. Setelah berhasil meretas, mereka kemudian mengubah tampilan website tersebut menjadi konten judi online. "Mereka melakukan aksinya dengan mencari website milik pemerintah (dengan URL go.id) maupun pendidikan (dengan URL ac.id) yang memiliki keamanan lemah," ucap Andri.

"Selanjutnya mereka melakukan defacing (mengubah

tampilan website) dengan konten yang bermuatan perjudian," imbuhnya.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menggerebek markas judi online (judol) yang berlokasi di sebuah apartemen di daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis (4/7).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan penggerebekan ini berdasarkan laporan masyarakat. Ia menuturkannya awalnya polisi menangkap enam orang.

"Benar didapatkan adanya kegiatan usaha perjudian online yang dioperasikan oleh enam orang tersangka dengan inisial FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21) dan FAP (19)," tutur Andri, Rabu (10/7).

Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu orang lainnya berinisial MHP (41). Ia merupakan pemilik rekening penampung hasil kejahatan.

Dia membeberkan dalam kasus ini polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu enam unit CPU, enam unit monitor, tujuh unit keyboard, enam buah mouse, delapan unit handphone, serta tiga unit sepeda motor. (cnni/js)

Pemerintah Bakal Perketat Penerima Subsidi



Jakarta, MIMBAR -

Pemerintah berencana untuk membatasi pemberian subsidi, khususnya subsidi BBM mulai 17 Agustus mendatang. Sinyal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa (9/7).

"Kita berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," kata Luhut, dikutip Rabu (10/7).

Menurut Luhut, pengurangan BBM subsidi kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran bisa berdampak besar atas efisiensi program subsidi lainnya.

Pasalnya, ia memprediksi Indonesia akan menghadapi tantangan ke depan. Untuk itu pemerintah, kata Luhut harus bisa menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran

negara.

Hal tersebut terlihat dari proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang akan lebih besar dari target pemerintah, akibat pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa banyak orang kaya yang menikmati subsidi BBM dan LPG. Bahkan, jumlahnya melebihi dari rakyat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan subsidi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mencatat ada 60 persen orang kaya yang menikmati BBM subsidi. Selain itu subsidi gas melon yang disalahgunakan juga tercatat sebanyak 57,9 persen yang dinikmati oleh orang-orang yang berkecukupan. (rm/js)

Tak Ada...

Dari Halaman 1

menewaskan 4 orang itu terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dan diduga kuat melibatkan oknum TNI.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil, mendorong Polri membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut.

Ia berharap pembentukan tim khusus itu dapat mengusut kasus secara tuntas dan tak menimbulkan spekulasi negatif yang berkembang di publik. Nasir berharap pihak di luar kepolisian juga tergabung membantu tim khusus tersebut.

"Saya pikir saya sependapat kalau kemudian ada usulan, dan kita dorong agar kepolisian membentuk satu tim khusus karena ini serius," kata Nasir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/7). (cnni/js)



Hidayah

Batas Usia...

Dari Halaman 1

yang beranggapan bahwa usia yang singkat atau meninggal begitu lahir ke dunia menjadi lebih baik, karena masih suci, tanpa dosa, dan otomatis menjadi penghuni surga.

Memang mem-persoalkan usia tentu tidak ada usainya, sebab orang-orang diberi usia panjang lalu sepanjang usia itu dia dapat beramal saleh, maka otomatis dapat dipastikan juga akan menjadi penghuni surga. Tetapi dengan usia panjang tidak beramal baik, maka dapat dipastikan akan menjadi penghuni neraka.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Kandungannya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun dia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan agar aku dapat melakukan amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikanmu dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri" (QS. Al Ahqof 15).

Jika membaca al-Qur'an, ayat di atas, ada usia manusia yang secara eksplisit disebutkan terkait dengan perkembangan kedewasaannya seseorang. Usia itu adalah 40 tahun. Kita renungkan maknanya ketika Allah berfirman tentang usia 40 tahun dalam surat Al-Ahqof ayat 15.

Memang menarik untuk mencari jawaban kenapa usia empat puluh disebutkan eksplisit dalam ayat tersebut. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya tentang ayat terse-

but menerangkan bahwa biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun maka sempurna akal, pemahaman, dan pengendalian dirinya.

Hal di atas sejalan dengan pandangan ilmiah. Beberapa analisis ahli psikologi menyatakan 40 tahun adalah momentum kematangan ruhani seseorang. Elizabeth B. Hurloch membagi masa dewasa menjadi tiga bagian, dewasa dini, dewasa madya, serta dewasa lanjut, dan menyebutkan batas antara dewasa dini dengan madya ada pada umur 40 tahun. Pada dewasa madya, usia 40 hingga 60 tahun, perhatian seseorang pada masalah agama lebih besar dari sebelumnya yang itu dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial.

Rasulullah Muhammad di utus oleh menjafi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Diberi amanah untuk memimpin dan membimbing ummatnya pada usia yang sudah matang kedewasaannya. Ibnu Abbas berkata "Barang siapa telah mencapai umur 40 tahun, sedangkan perbuatan baiknya belum dapat mengalahkannya perbuatan jahatnya maka hendaknya bersiap - siap masuk neraka". Ibnu katsir dalam tafsirnya menulis bawa usia 40 tahun "akal fikiran sudah matang, pemahaman dan kesabarannya pun sudah sempurna".

Persoalan kita di tanah air bukan soal panjang dan pendek usia yang diberi oleh Yang Maha Kuasa terhadap seseorang, tetapi usia juga menjadi persoalan politik. Bayangkan kalau kita berusia dibawah 30 tahun tidak diperbolehkan mendaftar sebagai calon Kepala Daerah. Tentulah peluang itu akan tidak ada gunanya. Ini tentu ada kaitan psikologis tadi sebagaimana dibicarakan di atas.

agar berpikir ulang untuk melakukan tindakan hukum dengan adanya tuntutan mati tersebut. Penetapan tuntutan pidana mati tersebut juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa hukuman setimpal bagi pelanggar berat kejahatan narkoba berupa

Dari Halaman 1

Kejati Sumut...

hukuman mati. "Tindak pidana narkotika merupakan sebuah persoalan yang tidak mudah dan menjadi jenis kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dimana, dengan narkoba yang diedarkannya sudah berapa banyak manusia yang korban, sudah berapa banyak generasi muda kita yang kehilangan masa depan," tegas mantan Kasi Pidus Kejari Deli Serdang ini.

Ada pun tuntutan pidana mati yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) berasal dari Kejari Medan (18 terdakwa), Kejari Asahan (14 terdakwa), Kejari Tanjung Balai (5 terdakwa), Kejari Deli Serdang (3 terdakwa). "Kemudian, Kejari Belawan (2 terdakwa), Kejari Langkat (1 terdakwa) dan Kejari Binjai (1 terdakwa), total keseluruhan 44 terdakwa," tandas Yos. (mc/js)

Kejagung Bakal...

Dari Halaman 1

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik vonis bebas Pengadilan Negeri (PN) Stabat terhadap eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin alias Cana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada penghuni kerangkeng manusia.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah menesalkan putusan tersebut. Ia menyebut putusan tersebut tidak memenuhi hak atas keadilan, terutama bagi para korban serta keluarga korban yang telah meninggal dunia. Dia pun meminta Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi proses pengadilan itu.

"Komnas HAM memandang perlunya lembaga-lembaga pengawas peradilan seperti Komisi Yudisial, melakukan pengawasan atas proses peradilan kasus tersebut," kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/7).

Dia juga mendukung langkah kejaksaan yang mengajukan kasasi atas vonis bebas PN Stabat kepada Cana.

Menurut Anis, putusan membebaskan terdakwa dalam kasus kerangkeng manusia tersebut menjadi kontra produktif di tengah upaya Indonesia memerangi TPPO yang sudah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa.

Komnas HAM berpandangan penguatan pencegahan dan penanganan TPPO perlu dilaksanakan lebih masif lagi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang bahayanya TPPO.

"Komnas HAM memandang bahwa putusan

bebas tersebut akan berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku TPPO terutama pelaku yang merupakan oknum aktor negara," kata dia.

Dia pun menyayangkan putusan PN yang tidak hanya memvonis bebas, tetapi juga tidak mengabulkan permohonan pembayaran restitusi sebesar Rp2,3 miliar yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).

Pada 2022 lalu, Komnas HAM melakukan penyelidikan terkait kasus kerangkeng manusia di rumah Rencana. Dalam penyelidikan tersebut, Komnas HAM menghasilkan sejumlah temuan di antaranya adanya tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Komnas HAM menemukan adanya pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut termasuk mantan Bupati Langkat, serta keterlibatan aparat TNI dan Polri.

Dalam kasus TPPO tersebut, setidaknya ada 19 orang yang patut diduga dapat dimintai pertanggungjawaban setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap 48 saksi.

Namun, di persidangan, majelis hakim PN Stabat, Kabupaten Langkat, menjatuhkan vonis bebas terhadap Cana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam Jaksa Penuntut Umum," kata majelis hakim yang diketuai Andriansyah dalam sidang putusan di PN Stabat, Senin (8/7). (cnni/js)

Lagi, Jokowi...

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar kepala daerah mampu memikirkan bagaimana cara mengemas pariwisata daerah menjadi lebih baik lagi sehingga mampu menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang.

Ia mencontohkan Bhutan yang mengusung konsep pariwisata bernilai tinggi namun terbatas. Bhutan, kata dia, memiliki alam dan tradisi yang terjaga dengan baik. Padahal, Bhutan tak banyak memiliki kekayaan alam.

"Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari yang tadi negara saya sebut," jelas Jokowi.

Selain Bhutan, Jokowi juga mencontohkan Maladewa (Maldives) yang menurutnya men-

erapkan hal yang sama, yakni mengincar turis high value.

Menurut Jokowi, Indonesia tak kalah dengan Maladewa. Perihal urusan wisata pantai, dia bilang Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya punya lebih banyak potensi wisata bahari daripada Maladewa.

"Saya lihat, karena hampir saya sudah 85 persen kota dan kabupaten yang saya kunjungi, pantai-pantai kita juga tidak kalah dengan yang namanya Maldives tadi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi juga menyentil kepala daerah yang kerap mengabaikan anggaran dengan kunjungan kerja. Orang nomor satu RI itu menilai, hal tersebut hanya menghamburkan uang rakyat saja. (cnni/A-10)

Hasyim Asy'ari...

Dari Halaman 1

atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kasus asusila.

"Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," ujar dia.

Sebelumnya, DKPP menyatakan Hasyim Asy'ari melakukan pelanggaran etik dalam kasus asusila. Hasyim terbukti melakukan pelanggaran etik karena melakukan kekerasan seksual terhadap anggota PPLN Den Haag,

Belanda.

DKPP memutus Hasyim harus dicopot sebagai anggota dan Ketua KPU. KPU telah menindaklanjuti putusan itu dengan menunjuk Mochamad Afifuddin sebagai Plt Ketua KPU RI.

Keputusan penunjukan Afif berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan Komisiner KPU di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7). (cnni/js)

Israel Kembali...

itu, demikian dikutip Al Jazeera.

Hari ini, Israel juga menyerang bangunan PBB di Gaza. Mereka mengklaim serangan itu untuk menargetkan Hamas yang berlandung di fasilitas sipil.

"[Hamas] beroperasi di dalam markas besar UNRWA di daerah tersebut dan menggunakan sebagai pangkalan melakukan serangan terhadap pasukan IDF [Pasukan Pertahanan Israel]," demikian menurut Israel, dikutip AFP.

UNRWA tak segera memberi komentar soal serangan tersebut.

Badan ini juga menyatakan "tak punya cara

untuk memverifikasi" klaim bahwa fasilitas mereka digunakan Hamas.

Serangan intensif Israel di Gaza terjadi saat pembicaraan negosiasi gencatan senjata di Qatar berlangsung.

Negosiasi gencatan senjata berlangsung alot. Biasanya topik yang menjadi perdebatan adalah pertukaran sandera atau tahanan hingga interval gencatan senjata.

Israel melancarkan agresi ke Gaza sejak Oktober 2023. Imbas operasi ini, lebih dari 38.000 orang di Palestina tewas dan ratusan ribu rumah hancur. (cnni/js)